



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Maret 2025/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH DAERAH D.I. YOGYAKARTA
UNIT KERJA : DINAS KESEHATAN

I. DATA PRIBADI

- Nama** : TRI SUNU HANDAYANI
- Jabatan** : WAKIL DIREKTUR PELAYANAN
- NHK** : 1002074

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.210.000.000

- Tanah dan Bangunan Seluas 327 m²/166 m² di SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.800.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 145 m²/130 m² di BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 410.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 102.500.000

- MOTOR, YAMAHA 2BJ Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 6.500.000
- MOBIL, TOYOTA NEW AVANZA 1.3 Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 96.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 20.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 729.349

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 2.333.229.349

III. HUTANG Rp. ---

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.333.229.349

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH DAERAH D.I. YOGYAKARTA
UNIT KERJA : DINAS KESEHATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SUDIHARJA
2. Jabatan : KEPALA BIDANG PELAYANAN PENUNJANG DAN SARANA
3. NHK : 416465

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	627.000.000
1. Tanah Seluas 246 m2 di BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 27.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 1429 m2/84 m2 di BANTUL, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 600.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	53.500.000
1. LAINNYA, HONDA GL15A1RR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 5.500.000		
2. MOBIL, DAIHATSU F500 TARUNA Tahun 1999, HIBAH TANPA AKTA Rp. 48.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	75.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	13.468.342
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	768.968.342
III. HUTANG	Rp.	125.078.130
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	643.890.212

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi



memenuhi kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH DAERAH D.I. YOGYAKARTA
UNIT KERJA : DINAS KESEHATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : JOEP AHMED DOJODIBROTO
2. Jabatan : KEPALA BIDANG PELAYANAN MEDIK DAN KEPERAWATAN
3. NHK : 273650

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.500.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 232 m²/250 m² di SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 1.100.000.000

1. MOBIL, HONDA JAZZ S Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000
2. MOBIL, DAIHATSU SIRION Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000
3. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO DAKAR SPORT Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
4. MOBIL, HONDA WR-V RS Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 290.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 19.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 18.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 2.637.000.000

III. HUTANG Rp. 18.700.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.618.300.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Maret 2025/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH DAERAH D.I. YOGYAKARTA
UNIT KERJA : DINAS KESEHATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AINI ULFANA
2. Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM
3. NHK : 1001598

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 375.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/72 m2 di KLATEN, HASIL SENDIRI Rp. 375.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 160.000.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR SOLO Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
2. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR SOLO Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
3. MOBIL, HONDA MOBIL PENUMPANG Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 40.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 21.129.570

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 596.129.570

III. HUTANG Rp. 256.599.146

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 339.530.424

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Maret 2025/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH DAERAH D.I. YOGYAKARTA
UNIT KERJA : DINAS KESEHATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AMI TURSINA
2. Jabatan : KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
3. NHK : 1002073

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.328.800.000

1. Tanah Seluas 161 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 128.800.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 725 m2/143 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/70 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 79.000.000

1. MOTOR, HONDA MATIC Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
2. MOTOR, HONDA MATIC Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
3. MOBIL, SUZUKI MT Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 7.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 34.829.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.449.629.000

III. HUTANG Rp. 290.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.159.629.000



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Maret 2025/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH DAERAH D.I. YOGYAKARTA
UNIT KERJA : DINAS KESEHATAN

I. DATA PRIBADI

- Nama** : DEWI LESTARI
- Jabatan** : KEPALA SEKSI STANDARISASI DAN MUTU
- NHK** : 995959

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	---
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	173.675.000
1. MOBIL, HONDA BRIO SATYA 1.2 E MT CKD Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 148.000.000		
2. MOTOR, HONDA SUPRA X 125 CW AFX12U21C08 M/T / SEPEDA MOTOR SOLO Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 12.975.000		
3. MOTOR, HONDA VARIO 110 FI CBS ISS MM D1A02N19M1 A/T SEPEDA MOTOR Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 12.700.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	17.488.200
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	192.740.211
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	383.903.411
III. HUTANG	Rp.	---
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	383.903.411

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi



memenuhi kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Maret 2025/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH DAERAH D.I. YOGYAKARTA
UNIT KERJA : DINAS KESEHATAN

I. DATA PRIBADI

- Nama** : LULUS RUBIONO AFFANDI
- Jabatan** : KEPALA SUB BAGIAN DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI
- NHK** : 995920

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	400.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 130 m ² /80 m ² di KAB / KOTA PURWOREJO, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	59.000.000
1. MOBIL, NISSAN SERENA Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 45.000.000		
2. MOTOR, YAMAHA NMAX Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	15.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	6.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	480.000.000
III. HUTANG	Rp.	290.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	190.000.000

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan



Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH DAERAH D.I. YOGYAKARTA
UNIT KERJA : DINAS KESEHATAN

I. DATA PRIBADI

- Nama** : RENY ASTUTI
- Jabatan** : KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
- NHK** : 893869

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **968.000.000**

- Tanah dan Bangunan Seluas 1.020 m²/400 m² di KAB / KOTA SLEMAN, WARISAN Rp. 275.000.000
- Tanah Seluas 3.101 m² di KAB / KOTA SLEMAN, WARISAN Rp. 225.000.000
- Tanah Seluas 390 m² di KAB / KOTA KULON PROGO, HASIL SENDIRI Rp. 468.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **120.750.000**

- MOBIL, SUZUKI MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
- MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 16.000.000
- MOTOR, HONDA ZUPRA-X Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 4.750.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **40.000.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **167.312.056**

F. HARTA LAINNYA **Rp.** **----**

Sub Total **Rp.** **1.296.062.056**

III. HUTANG **Rp.** **73.000.000**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp.** **1.223.062.056**



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Maret 2025/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH DAERAH D.I. YOGYAKARTA
UNIT KERJA : DINAS KESEHATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SITI SUMIATI**
2. Jabatan : **KEPALA SUBBAGIAN HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT**
3. NHK : **1001926**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.000.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 61 m2/90 m2 di BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 91 m2/36 m2 di SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000		
3. Tanah Seluas 531 m2 di PURWOREJO, HADIAH Rp. 100.000.000		
4. Tanah Seluas 778 m2 di PURWOREJO, HADIAH Rp. 50.000.000		
5. Tanah Seluas 619 m2 di PURWOREJO, HADIAH Rp. 100.000.000		
6. Tanah Seluas 589 m2 di PURWOREJO, HADIAH Rp. 100.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	108.000.000
1. MOBIL, SUZUKI MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000		
2. MOTOR, SUZUKI SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HADIAH Rp. 3.000.000		
3. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000		
4. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	82.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	104.064.794



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.294.064.794
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.294.064.794

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Maret 2025/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH DAERAH D.I. YOGYAKARTA
UNIT KERJA : DINAS KESEHATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SLAMET RIYANTO**
2. Jabatan : **KEPALA SEKSI PELAYANAN KEPERAWATAN**
3. NHK : **995857**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. **886.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 148 m2/122 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 776.000.000
2. Tanah Seluas 150 m2 di KAB / KOTA KLATEN, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 110.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **253.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA AVANZA Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 165.000.000
2. MOTOR, HONDA ADV Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 19.000.000
4. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
5. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
6. MOTOR, HONDA SUPRA Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **31.500.000**

D. SURAT BERHARGA Rp. **---**

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. **479.400.000**



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.649.900.000
III. HUTANG	Rp.	24.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.625.900.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH DAERAH D.I. YOGYAKARTA
UNIT KERJA : DINAS KESEHATAN

I. DATA PRIBADI

- Nama** : TUTI HANDAYU
- Jabatan** : KEPALA SEKSI SARANA DAN PENUNJANG NON MEDIK
- NHK** : 415636

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 635.000.000

- Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/100 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 375.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/200 m2 di KAB / KOTA KLATEN, WARISAN Rp. 95.000.000
- Tanah Seluas 505 m2 di KAB / KOTA PURWOREJO, WARISAN Rp. 165.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 82.000.000

- MOBIL, TOYOTA AVANZA 1300 G Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 64.500.000
- MOTOR, HONDA VARIO 150 X1H02N35MI A/T Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 17.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERTAHAGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 2.726.822

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 719.726.822

III. HUTANG Rp. 175.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 544.726.822

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH DAERAH D.I. YOGYAKARTA
UNIT KERJA : DINAS KESEHATAN

I. DATA PRIBADI

- Nama** : VERONIKA SURYANINGSIH
- Jabatan** : KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA
- NHK** : 895949

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 585.000.000

- Tanah dan Bangunan Seluas 80 m²/54 m² di GUNUNG KIDUL, HASIL SENDIRI Rp. 225.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 134 m²/110 m² di SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 360.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 215.500.000

- MOBIL, TOYOTA RUSH 1,5 S A/T Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000
- MOTOR, HONDA CB15A1 Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 9.500.000
- MOTOR, YAMAHA 5 TL MIO AL CW 115 8 Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000
- MOTOR, YAMAHA BJM A/T Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 44.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 227.050.040

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.071.550.040

III. HUTANG Rp. 78.800.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 992.750.040



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

Yth. Sdr **AKHMAD AKHADI SYAMSUDHUHA**

PEMERINTAH DAERAH D.I. YOGYAKARTA

Di Tempat

Bersama ini kami informasikan bahwa LHKPN yang Bapak/Ibu kirimkan telah kami terima dengan ringkasan sebagai berikut :



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

**LEMBAR PENYERAHAN FORMULIR
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama	: AKHMAD AKHADI SYAMSUDHUHA
Jabatan	: DIREKTUR - UPT RSJ GRHASIA - DINAS KESEHATAN
Bidang	: EKSEKUTIF
Lembaga	: PEMERINTAH DAERAH D.I. YOGYAKARTA
Tanggal / Tahun Pelaporan	: 2024

Email konfirmasi Lembar Penyerahan LHKPN ini bukan merupakan Tanda Terima LHKPN. Tanda terima LHKPN akan kami kirimkan setelah Dokumen Kelengkapan telah kami terima dan LHKPN telah diverifikasi oleh Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN.

Setelah mengirimkan LHKPN, Lampiran 4. Surat Kuasa dapat segera dikirimkan dengan batas waktu 2 minggu (jika Surat Kuasa sudah pernah disampaikan tidak perlu dikirim kembali).

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kami kembali melalui email elhkpn@kpk.go.id atau call center **198**.

Atas kerjasama yang diberikan, Kami ucapkan terima kasih

Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

Direktorat PP LHKPN KPK | www.kpk.go.id | elhkpn.kpk.go.id | Layanan LHKPN **198**